

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan atau *stakeholders* perusahaan yang bersangkutan. *Stakeholders* adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post, *et. al*, 2002 p.8). *Stakeholders* terdiri dari *inside* dan *outside stakeholders*. *Inside stakeholders* biasanya yang menjadi fokus tanggungjawab suatu perusahaan, sedangkan *outside stakeholders* yang seringkali diabaikan terutama *local community* (masyarakat).

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Sesuai dengan peraturan dalam undang-undang ini, maka industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya. Korporasi dituntut bukan hanya harus memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan hidup, tetapi juga pada isu-isu sosial dari masyarakat yang merasakan ataupun yang mengalami langsung dampak-dampak negatif yang muncul dari operasi perusahaan. Industri atau korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup (Siregar, 2007).

Mulai munculnya kesadaran dari perusahaan swasta maupun pemerintahan pada era saat ini, untuk memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan

dari operasional perusahaan, meskipun dengan adanya perusahaan juga dapat memberikan manfaat untuk pembangunan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, perusahaan mendapat tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut apabila tidak mengantisipasi dan mencermati sisi negatif dari industrialisasi.

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup (Chairil N. Siregar dalam Hasan Asy'ari 2009). Dalam hal ini, pihak yang seringkali mendapatkan kontra prestasi langsung dari industrialisasi karena dipandang secara modal dan kesempatan tidak memiliki akses terhadap aktifitas industrialisasi yaitu masyarakat garis bawah (*grass rooth*).

Dalam rangka menjaga eksistensi suatu perusahaan, maka perusahaan itu harus dapat menjaga keseimbangan hubungan dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan dan mencapai *Good Bussiness* (Kartikasari, 2012). Keseimbangan dapat dijaga dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

PT. Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) merupakan perusahaan penghasil minyak murni yang beroperasi di Kecamatan Gresik. Bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat di sekitar area perusahaan dengan mengadakan program CSR. Program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore diharapkan sebagai upaya dalam mengantisipasi munculnya konflik sosial atau kemungkinan ketidakpedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan juga dapat

menyebabkan konflik sosial. Dimana kemungkinan hambatan dalam aktifitas operasional perusahaan dapat menimpa perusahaan apabila terjadi benturan atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat, tentunya hal ini akan sangat merugikan bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga berimbas pada masyarakat itu sendiri maupun bagi Negara sehingga sangat dibutuhkan adanya harmonis hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara, sedangkan yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peran dan tanggung jawab sosial Pertamina dilaksanakan salah satunya melalui SME & SR (Small Medium Enterprise & Social Responsibility) Partnership Program atau lebih dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana yang diatur dalam Permen-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Program CSR yang telah dilaksanakan oleh PHE WMO diantaranya memberikan beasiswa pendidikan, pengobatan gratis, pembagian sembako, sosialisasi kewirausahaan, sosialisasi pembukuan keuangan dan lain-lain. Di penghujung tahun 2013, program CSR yang diimplementasikan PHE WMO memperoleh penghargaan PROPER hijau tahun 2013 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI yang merupakan penghargaan ketiga kalinya.

Selain itu, juga memperoleh penghargaan Industrial Peace Award kategori *zero conflict* dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan

dinamis di lingkungan perusahaan dari Gubernur Jawa Timur, serta Penghargaan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup kategori RKL-RPL dengan predikat Terbaik dari Gubernur Jawa Timur (Surya online, diakses 16 September 2014).

*Community Relations* merupakan salah satu bagian dari *Public Relations* apabila dilihat dari jenis publiknya. *Community Relations* sebagai salah satu bentuk *Public Relations*, terdiri atas partisipasi institusi yang terencana, aktif, dan terus menerus dalam komunitas untuk memelihara serta melakukan perbaikan terhadap lingkungannya untuk keuntungan dan kebaikan komunitas serta institusi itu sendiri (Lattimore et al, 2010 p.197). Dalam *Community Relations*, maka jenis publik yang kemudian menjadi sasaran adalah komunitas. *Community Relations* dapat dilaksanakan melalui implementasi *Corporate Social Responsibility*. Pendekatan *Community Relations* tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunitas lokal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Al Adha Rainir (2013) bahwa *Community relations* melalui kegiatan CSR yang dilakukan PT. Chevron Pacific Indonesia berhasil menghasilkan hubungan baik dengan masyarakat setempat dan masyarakat memiliki pandangan positif dengan perusahaan, hal tersebut sesuai dengan prinsip CSR dan *Community Relations*.

Salah satu publik yang memberikan kontribusi terbentuknya reputasi organisasi adalah komunitas. Komunitas dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan terkait dengan keberadaan organisasi, serta secara geografis berada di wilayah sekitar organisasi (Grunig & Hunt 1984 dalam Yudarwati, 2006). Keberadaan komunitas menjadi penting bagi kelangsungan

eksistensi organisasi mengingat komunitas merupakan kelompok masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu, yang juga menjadi bagian dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Kerangka hubungan organisasi dengan komunitas diletakkan dalam kerangka hubungan bertetangga yang baik dan memiliki rasa saling ketergantungan. Komunitas sekitar dapat berperan untuk menjaga perusahaan itu sendiri dari risiko atau peristiwa buruk yang mungkin dapat terjadi. Sebaliknya perusahaan juga dapat turut membantu mengembangkan potensi kehidupan sosial, budaya dan perekonomian komunitas setempat (Yudarwati, 2006).

Menurut Milne (dalam Mulyadi dkk 2012) masalah yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat umumnya tidak mengerti tentang CSR. Masyarakat tidak mengetahui program CSR yang dilaksanakan. CSR belum tersosialisasi secara merata. Penerima CSR belum merata (hanya kalangan tertentu).

Dalam menjalankan tugasnya yaitu memproduksi barang atau jasa yang akan dihasilkan untuk masyarakat atau konsumen, tidaklah jarang terjadi adanya konflik kepentingan antara masyarakat umum dengan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik perusahaan besar, menengah maupun perusahaan kecil. Bentrokan kepentingan ini sering terjadi terutama karena adanya polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Polusi ini dapat berupa polusi udara, polusi air limbah, polusi suara dan bahkan polusi mental kejiwaan (Mulyadi, 2012). Seperti halnya yang terjadi pada kalangan komunitas lokal PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore di kecamatan Sidorukun, pada pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan

beberapa keluhan dan protes dari warga akibat polusi yang muncul diselokan berupa minyak pada tahun 2013. Kejadian tersebut membuat warga panik dan memunculkan kembali sinyal polusi mental kejiwaan mereka yang takut karena berdekatan dengan perusahaan produksi minyak dan gas yang berisiko tinggi.

Tokoh Masyarakat kecamatan Sidorukun juga menyuarakan keluhan mereka mengenai penerima beasiswa yang jumlahnya masih sangat minim hanya satu orang se-Kecamatan tiap tahunnya. Begitu pula dengan para karyawan PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore yang dikeluhkan warga adalah mengapa karyawan di perusahaan tersebut hanya berjumlah dua orang yang berasal dari warga kecamatan Sidorukun.

Sementara itu peneliti memperoleh informasi dari berbagai sumber media diantaranya dari Gresik news bahwa protes warga terhadap PHE WMO terjadi berasal dari warga Bangkalan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Bangkalan (Kamaba) berdemo di depan PT. Pertamina Hulu Energi WMO Jl. Amak Kasim Desa Sidorukun Gresik, Jumat 5 September 2014. Aksi menolak eksploitasi yang dilakukan PHE WMO terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Bangkalan. Dari koran Kompas, Sosialisasi area terbatas dan terlarang oleh nelayan Bangkalan, Jawa Timur di lokasi eksplorasi minyak dan gas (Migas) yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), Sabtu (22/6/2013) dibubarkan paksa oleh gabungan kepala desa. Rombongan kepala desa itu datang dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Sepulu, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan.

Menempatkan diri sebagai bagian dari warga yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dalam situsnya PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, terutama berupaya mengantisipasi munculnya isu dari masyarakat yang terkait dengan dampak negatif sebagai akibat kegiatan operasional perusahaan.

Dalam hal pengukuran tingkat keberhasilan korporasi yang berada dibawah naungan pemerintah atas program CSR yang telah dilakukan, dapat dilakukan dengan menggunakan PROPER. PROPER yaitu singkatan dari Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan hidup sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penilaian PROPER sangat lengkap dimulai dari tahapan perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi program CSR. Selain itu, PROPER juga menilai bagaimana hubungan sosial antara Perusahaan dengan *Local Community*. Dengan menggunakan formulir konflik yang harus diisi oleh perusahaan, apabila ada terjadi konflik di lingkungannya beserta dengan cara penanganan konflik tersebut. Indikator didalam tahapan-tahapan tersebut diatur oleh Pemerintah dan telah diketahui oleh Perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Pemerintah (BUMN), sehingga sudah sepatutnya setiap Perusahaan BUMN telah melaksanakan dengan lengkap dan baik setiap butir indikator dalam penilaian PROPER.

Perusahaan yang memperoleh penghargaan PROPER diumumkan melalui berbagai media seperti media cetak, online, maupun televisi sehingga bagi perusahaan yang memperoleh penghargaan PROPER dinilai oleh publik telah melaksanakan dengan baik implementasi program CSR dan berhasil membangun hubungan sosial yang baik pula dengan masyarakat. Menurut Hadi dan Adji (dalam Sumardiyono, 2007), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian lingkungan yang berbasis insentif dan disinsentif. Artinya dengan diumumkannya peserta PROPER dengan peringkat Hijau, Biru, Merah dan Hitam, akan diketahui oleh masyarakat dan bisa menimbulkan citra sesuai dengan peringkat yang mereka capai.

Dalam penelitian ini mengevaluasi program *Corporate Social Responsibility* pada periode tahun 2013 yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dengan menggunakan parameter PROPER. Program CSR pada periode tahun 2013 dipilih karena pada tahun tersebut PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore memperoleh penghargaan PROPER HIJAU untuk ketiga kalinya, setelah sempat mendapatkan PROPER BIRU pada tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat cepatnya perubahan atas upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk memperbaiki capaian hasil perolehan penilaian PROPER dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Menurut Prayogo (2011) Khusus bagi industri tambang dan migas, program ini memiliki posisi strategis guna membangun relasi resiprokal antara



korporasi dengan pemangku kepentingan *stakeholdernya*. Berhasil atau gagalnya program ini dapat turut menentukan “keabsahan sosial” korporasi. Untuk itu diperlukan evaluasi agar dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan program CSR yang telah dilakukan. Evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan pemangku kepentingannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore yang telah memperoleh penghargaan PROPER HIJAU dapat menjadi acuan keberhasilan bahwa bukan hanya berhasil dalam program CSR tetapi juga berhasil dalam membangun *Community Relations*.

Menggunakan PROPER sebagai parameter karena sebagai satu-satunya parameter yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan BUMN dalam bidang sumber daya alam, dalam hal ini yaitu PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Penilaian PROPER dilakukan oleh pihak akademisi (peneliti) secara objektif karena tidak memiliki kepentingan apapun dengan Perusahaan.

Selain itu, PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore yang telah berhasil beberapa kali memperoleh penghargaan PROPER berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian penghargaan. Hal ini terkait dengan upaya yang dilakukan PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dalam membangun *Community Relations*.

## 1.2 Fokus Penelitian

PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mendapat penghargaan PROPER HIJAU tahun 2013. Keberhasilan PHE WMO ini juga mengarahkan keberfungsian kinerja *Community Relations*.

*Community Relations* bisa dilaksanakan dan hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat lokal bisa terwujud dengan melakukan perencanaan program CSR yang jelas, terbuka, tegas dan partisipatif.

## 1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti adalah :

1. Apakah program CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore berhasil dalam membangun *Community Relations* ?
2. Bagaimana tanggapan dan harapan *Local Community* sebagai penerima program CSR dari PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dalam membangun *Community Relations* melalui program CSR yang sudah dilakukan.
2. Untuk mengetahui tanggapan dan harapan *Local Community* sebagai penerima program CSR dari PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi untuk mengetahui program CSR yang sudah dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dalam membangun *Community Relations*.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore mengenai program CSR yang telah dilaksanakan dalam membangun *Community Relations* pada khususnya, dan pada umumnya sebagai bahan referensi bagi rekan mahasiswa.